

## **Transformasi Digital Perpajakan melalui CTAS dan Implikasinya terhadap Transparansi serta Efisiensi Layanan di RRI Medan**

**Gabriela Wiraditha<sup>1</sup>, Agus Tripriyono<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Program Studi Akuntansi, Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

### **Abstrak**

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menerapkan *Core Tax Administration System* (CTAS) sebagai strategi intensifikasi untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi layanan perpajakan. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan implementasi CTAS di LPP RRI Medan, serta menelaah dampaknya terhadap layanan publik, tantangan pelaksanaan, dan faktor-faktor pendukung keberhasilan sistem. Metode yang digunakan bersifat kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, yang dianalisis secara tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi CTAS dilakukan secara bertahap melalui perencanaan, pelatihan SDM, dan penerapan teknis sistem. CTAS terbukti meningkatkan keterbukaan data dan kecepatan layanan. Namun, tantangan seperti resistensi perubahan, keterbatasan kompetensi digital, serta kurangnya koordinasi internal masih menjadi hambatan. Dukungan dari DJP berupa pelatihan berkelanjutan dan peningkatan infrastruktur digital terbukti memperkuat adopsi sistem ini. Temuan ini menegaskan bahwa CTAS berperan penting dalam transformasi digital sistem perpajakan, khususnya dalam memperkuat efisiensi dan akuntabilitas layanan.

**Kata Kunci:** *CTAS, digitalisasi perpajakan, transparansi, efisiensi layanan, RRI Medan.*

### **Abstract**

The Directorate General of Taxes (DGT) implemented the *Core Tax Administration System* (CTAS) as an intensification strategy to improve transparency and efficiency in tax services. This study aimed to describe the implementation of CTAS at LPP RRI Medan and to examine its impact on public service delivery, the challenges faced, and the supporting factors contributing to the system's effectiveness. A descriptive qualitative method was employed, using observation, interviews, and documentation, analyzed thematically. The findings revealed that CTAS was implemented in stages through planning, human resource training, and technical system application. CTAS improved data transparency and service speed. However, several obstacles were encountered, including resistance to change, limited digital competence, and lack of internal coordination. Support from DGT in the form of continuous training and enhancement of digital infrastructure significantly strengthened the system's adoption. These results emphasized the vital role of CTAS in driving digital transformation in taxation systems, particularly in enhancing efficiency and accountability.

**Keywords:** *CTAS, digital taxation, transparency, service efficiency, RRI Medan.*

Copyright (c) 2025 Gabriela Wiraditha<sup>1</sup>, Agus Tripriyono<sup>2</sup>

✉ Corresponding author : gabrielawiraditha@gmail.com<sup>1</sup>

## PENDAHULUAN

Transformasi digital telah menjadi agenda strategis dalam reformasi administrasi perpajakan di Indonesia (Rejeki & Syadat, 2025). Sejak diterapkannya sistem self-assessment pada tahun 1983, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus melakukan pembaruan sistem guna meningkatkan efisiensi dan transparansi, terutama pascakrisis ekonomi 1998 yang menuntut keterbukaan fiskal sebagai prasyarat bantuan internasional (Dalimunthe & Parinduri, 2025). Salah satu langkah mutakhir dalam agenda reformasi tersebut adalah implementasi *Core Tax Administration System* (CTAS) yang mulai berlaku berdasarkan PMK No. 81 Tahun 2024 dan efektif diterapkan sejak 1 Januari 2025 (Tarihoran et al., 2025).

CTAS merupakan sistem digital yang secara menyeluruh mendigitalisasi proses administrasi perpajakan, mulai dari pendaftaran, pelaporan, hingga pengawasan kepatuhan (Aburizal & Maliki, 2025). Sistem ini tidak hanya bertujuan mempermudah pelayanan kepada wajib pajak, tetapi juga meningkatkan kapasitas DJP dalam melakukan analisis data secara *real-time* guna mendeteksi ketidaksesuaian dan mencegah penghindaran pajak (Cahyadi, 2025). Implementasi CTAS diyakini mampu membentuk ekosistem perpajakan yang adaptif, akuntabel, serta mendukung pencapaian target penerimaan negara jangka panjang (Fajriyah, 2025).

Keberhasilan implementasi CTAS memerlukan kesiapan infrastruktur digital, kompetensi SDM, serta integrasi data lintas sektoral (Asmoro et al., 2024). Di sisi lain, tantangan seperti resistensi organisasi, kesenjangan teknologi, dan isu keamanan data menjadi hambatan yang signifikan (Nabila et al., 2024). Penguatan kelembagaan, regulasi perlindungan data, serta peningkatan literasi digital menjadi prasyarat mutlak dalam penerapan sistem ini (Faruq et al., 2024).

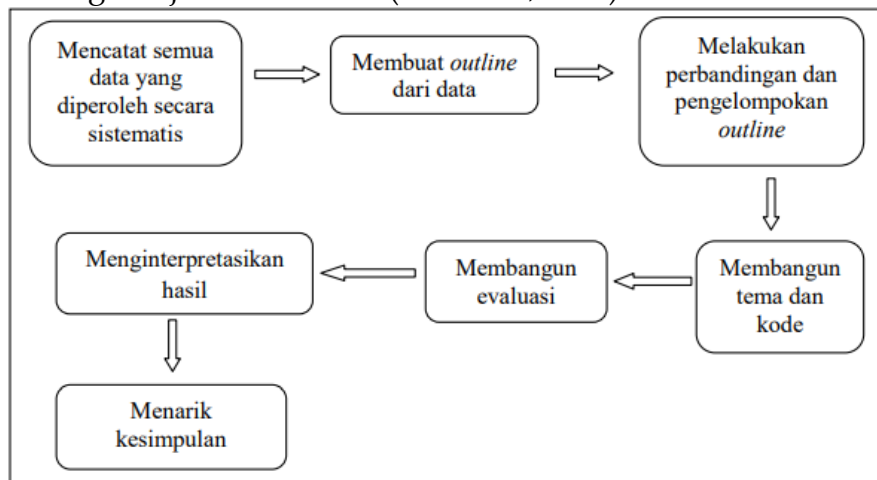
Pada Lembaga Penyiaran Publik seperti Radio Republik Indonesia (RRI) Medan, implementasi CTAS membawa implikasi penting terhadap pengelolaan keuangan dan pelayanan publik (Amanda et al., 2022). Berdasarkan data anggaran tahun 2024, realisasi belanja RRI Medan hanya mencapai 41,12% dari total pagu, dengan belanja barang yang paling rendah penyerapannya. Rendahnya penyerapan anggaran mengindikasikan adanya masalah dalam efisiensi perencanaan, pelaksanaan program, serta kemungkinan hambatan administratif (Indonesia 2024). Hal ini menegaskan pentingnya integrasi sistem perpajakan digital dalam mendukung transparansi dan efektivitas tata kelola keuangan lembaga non-fiskal (Erstiawan, 2025).

Meskipun banyak penelitian sebelumnya membahas implementasi CTAS dalam konteks DJP atau aspek teknis sistem, kajian mengenai dampaknya terhadap lembaga pengguna seperti LPP RRI masih terbatas. Padahal, keberhasilan transformasi digital perpajakan juga bergantung pada kesiapan dan respons institusi penerima kebijakan (Maisyura et al., 2025). Penelitian ini berupaya mengisi celah tersebut dengan menganalisis implementasi CTAS dan implikasinya terhadap transparansi serta efisiensi layanan publik di RRI Medan. Fokus ini relevan untuk menilai sejauh mana digitalisasi perpajakan mampu berkontribusi terhadap perbaikan tata kelola lembaga penyiaran publik di era konvergensi digital.

## METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mengeksplorasi transformasi digital perpajakan melalui implementasi *Core Tax Administration System* (CTAS) di LPP RRI Medan, serta implikasinya terhadap transparansi dan efisiensi layanan publik (Moleong, 2019). Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam pengalaman, persepsi, dan respon dari pihak internal RRI terhadap digitalisasi sistem perpajakan (Creswell & Poth, 2018). Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan sepuluh informan yang terdiri dari satu pejabat struktural dan sembilan staf keuangan, serta didukung dengan observasi partisipatif dan dokumentasi dari berbagai sumber sekunder. Fokus utama penelitian meliputi tiga aspek: transformasi digital yang diukur melalui penggunaan teknologi dan adopsi sistem daring; transparansi layanan melalui keterbukaan informasi dan laporan publik; serta efisiensi layanan yang dilihat dari kecepatan proses administrasi dan kepuasan pengguna.

Proses pengumpulan data dilakukan secara langsung di lokasi penelitian selama Januari hingga Juni 2025. Data dianalisis menggunakan metode analisis tematik dengan mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul secara eksplisit maupun implisit dari narasi informan. Teknik ini memungkinkan peneliti menggali makna mendalam dari fenomena digitalisasi pajak yang sedang berlangsung (Moleong, 2019). Analisis dilakukan secara induktif untuk membangun pemahaman berdasarkan data lapangan, namun tetap dikaitkan dengan temuan dan teori sebelumnya sebagai rujukan deduktif (Arikunto, 2019).



Gambar 1. Alur Analisis Tematik yang Digunakan

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

#### Optimalisasi Transparansi dan Efisiensi Layanan Publik melalui Implementasi *Core Tax Administration System* (CTAS) di LPP RRI Medan

Implementasi *Core Tax Administration System* (CTAS) di Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) Medan merupakan bentuk nyata dari upaya transformasi digital di sektor administrasi perpajakan. Sistem ini dirancang sebagai bagian dari reformasi pajak nasional yang bertujuan meningkatkan kualitas layanan, efektivitas pengawasan, serta keandalan pengelolaan data secara menyeluruh. Melalui regulasi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 81 Tahun

2024, CTAS menjadi instrumen utama dalam mendorong perluasan basis pajak dan peningkatan kepatuhan wajib pajak (Alfirdaus & Anas, 2024). Di lingkungan RRI Medan, penerapan sistem ini dilakukan melalui tahapan sistematis, seperti perencanaan, sosialisasi internal, pelatihan terbatas bagi staf, hingga bimbingan teknis dari otoritas terkait. Informan dari berbagai unit struktural menyampaikan bahwa pelaksanaan CTAS dilakukan secara bertahap, didampingi supervisi pusat dan koordinasi lintas bagian. Pendekatan ini menunjukkan adanya kesiapan kelembagaan dalam mengadopsi teknologi modern untuk mendukung administrasi yang lebih transparan dan efisien.

Transformasi digital melalui CTAS secara langsung memperkuat transparansi layanan publik di lingkungan RRI Medan. Sistem ini mencatat seluruh transaksi perpajakan secara digital dan *real-time*, sehingga memungkinkan pelacakan data secara menyeluruh, baik oleh otoritas eksternal maupun internal lembaga. Kemampuan sistem dalam mencatat jejak administrasi secara otomatis meminimalisir risiko manipulasi data dan meningkatkan akuntabilitas kinerja pegawai (Rizal et al., 2024). Sejumlah informan menyampaikan bahwa laporan keuangan kini dapat diakses lebih terbuka, audit internal menjadi lebih mudah dilakukan, serta pengawasan terhadap anggaran operasional, termasuk pengeluaran redaksi, menjadi lebih akurat. Artinya, CTAS bukan hanya sebagai alat bantu teknis, melainkan juga instrumen kelembagaan untuk mendorong budaya kerja yang lebih transparan dan berorientasi pada akuntabilitas. Perubahan ini memperlihatkan bahwa transformasi digital perpajakan mampu membentuk sistem layanan yang tidak hanya efisien dari sisi teknis, tetapi juga terpercaya dari sisi pengawasan publik (Gymnastiar et al., 2024).

Di samping transparansi, efisiensi merupakan dampak signifikan lainnya dari implementasi CTAS (Nurhaeni et al., 2025). Seluruh prosedur manual yang sebelumnya memakan waktu dan sumber daya kini telah digantikan oleh sistem otomatisasi, mulai dari pelaporan, pencatatan, hingga pemrosesan data pajak. Proses pelaporan pajak bulanan, misalnya, tidak lagi membutuhkan pengiriman manual, melainkan cukup dilakukan secara daring, yang pada akhirnya menghemat waktu, biaya operasional, dan penggunaan kertas. Beberapa informan juga menegaskan bahwa penggunaan sistem seperti *e-Faktur* turut mempercepat transaksi dan pelacakan data keuangan. Efisiensi ini tidak hanya mendukung kelancaran operasional internal, tetapi juga memperkuat peran RRI Medan sebagai lembaga publik yang adaptif terhadap inovasi teknologi (Wahidah et al., 2025). Dengan demikian, CTAS tidak hanya menjadi penunjang administratif, melainkan juga katalisator dalam membentuk layanan publik yang modern, hemat sumber daya, dan semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan regulasi negara (Arifin et al., 2025).

### **Tantangan Implementasi Core Tax Administration System (CTAS) dalam Meningkatkan Efektivitas Layanan Perpajakan di LPP RRI Medan**

Implementasi *Core Tax Administration System* (CTAS) sebagai sistem administrasi perpajakan berbasis digital merupakan langkah strategis pemerintah dalam membangun sistem perpajakan yang lebih modern, transparan, dan efisien (Utama & Yuliana, 2025). CTAS didesain untuk menghadirkan layanan perpajakan yang Mudah, Andal, Terpadu, Akurat, dan Pasti (MANTAP) melalui otomasi penuh terhadap proses registrasi, pelaporan, hingga pembayaran pajak (Korat & Munandar,

2025). Di LPP RRI Medan, sistem ini bertujuan mendukung tata kelola pajak secara *real-time* serta mengurangi ketergantungan terhadap prosedur manual. Meskipun demikian, proses implementasi di lapangan menghadapi sejumlah tantangan serius, baik dari sisi teknis maupun kesiapan sumber daya manusia (SDM). Seperti disampaikan oleh Informan AP, “Masih perlu pelatihan lanjutan,” menunjukkan bahwa kebutuhan peningkatan kapasitas menjadi krusial agar teknologi ini dapat dimanfaatkan secara optimal oleh seluruh elemen organisasi.

Salah satu tantangan mendasar yang dihadapi adalah rendahnya literasi digital sebagian pegawai, terutama mereka yang tidak memiliki latar belakang teknis. Hal ini terlihat dari pernyataan Informan YA bahwa “Minim pengetahuan teknis, perlu bimbingan,” serta Informan AL yang menyatakan “Masih perlu peningkatan kapasitas bagi staf administrasi keuangan.” Di sisi lain, terdapat pula unit kerja yang menunjukkan adaptasi positif terhadap sistem, seperti yang diungkapkan Informan KS: “SDM teknis cukup adaptif terhadap sistem baru.” Temuan ini mencerminkan ketimpangan internal dalam kesiapan SDM yang berdampak pada efektivitas implementasi CTAS. Selain itu, kendala non-teknis seperti kurangnya sosialisasi ke bagian non-keuangan (Informan YA) dan pemahaman sistem yang belum merata (Informan SA) memperkuat asumsi bahwa penguatan koordinasi lintas divisi dan penyebaran informasi secara menyeluruh menjadi kunci keberhasilan digitalisasi perpajakan di lingkungan RRI Medan.

Kendala teknis juga menjadi hambatan signifikan, seperti gangguan jaringan, error sistem, dan keterbatasan perangkat keras. Beberapa informan melaporkan permasalahan sistemik seperti “Koneksi sistem sering lambat” (Informan AP), “Sering terjadi error saat pengunggahan laporan bulanan” (Informan SS), serta “Ada gangguan dalam update data ke pusat” (Informan DS). Hambatan-hambatan ini tidak hanya memperlambat proses pelaporan pajak, tetapi juga berpotensi menurunkan kepercayaan internal terhadap keandalan sistem. Akibatnya, sebagian proses perpajakan masih harus dilakukan secara manual sebagai solusi alternatif sementara. Ketergantungan ini tentu bertolak belakang dengan tujuan utama penerapan CTAS, yakni untuk mendorong efisiensi, akuntabilitas, dan integrasi sistem perpajakan secara menyeluruh. Untuk mencapai efektivitas penuh dari sistem ini, diperlukan pendekatan strategis yang mencakup penguatan infrastruktur digital, peningkatan kapasitas SDM secara berkelanjutan, serta koordinasi lintas unit yang solid dalam mendukung budaya kerja digital (Gymnastiar et al., 2024).

### **Faktor Kunci Pendorong Keberhasilan Implementasi *Core Tax Administration System* (CTAS) dalam Mewujudkan Transparansi dan Efisiensi Layanan Publik di LPP RRI Medan**

Upaya reformasi perpajakan yang dilakukan pemerintah melalui penerapan *Core Tax Administration System* (CTAS) menjadi langkah strategis dalam menyatukan seluruh proses administrasi perpajakan, mulai dari registrasi, pelaporan, pembayaran hingga penegakan hukum, dalam satu platform digital yang terpadu (Aldo et al., 2025). Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 81 Tahun 2024, sistem ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik dalam pengelolaan pajak (Handayani et al., 2025). Implementasi teknologi ini terbukti mampu mengurangi kesalahan manusia, mempercepat proses administrasi, serta meminimalisir potensi kecurangan (Hasanah, 2024). Digitalisasi perpajakan juga diharapkan dapat mendorong perubahan paradigma bahwa

kepatuhan pajak bukan beban, melainkan bentuk kontribusi yang rasional dan mudah dijalankan oleh masyarakat (Khusniah et al., 2025). Hal ini sejalan dengan temuan Khusniah et al. (2025) bahwa sistem Core Tax mampu mengurangi hambatan administratif dan mendorong kemudahan akses bagi wajib pajak.

Keberhasilan implementasi CTAS di LPP RRI Medan tidak lepas dari berbagai faktor pendukung yang saling berkaitan. Pertama, adanya komitmen yang kuat dari pimpinan dalam mendorong digitalisasi menjadi penggerak utama terciptanya lingkungan kerja yang responsif terhadap perubahan. Hal ini diperkuat dengan ketersediaan infrastruktur teknologi yang memadai, termasuk jaringan internet yang stabil dan perangkat keras yang mendukung (Amanda et al., 2022). Kedua, kesiapan sumber daya manusia juga menjadi aspek fundamental, di mana pelatihan dan pendampingan teknis yang disediakan oleh DJP memberikan bekal operasional bagi staf dalam mengelola sistem dengan optimal. Para informan menegaskan bahwa komunikasi internal yang lancar, koordinasi antardivisi, serta kepemimpinan aktif menjadi faktor kunci pendorong keberhasilan. Responden seperti Informan AP dan ER secara eksplisit menyatakan bahwa dukungan pusat dan dorongan dari pimpinan memainkan peran signifikan dalam proses transisi ini.

Kebijakan internal yang selaras dengan arahan pusat menjadi penguat implementasi. Dukungan berupa SOP, modul teknis, dan instruksi langsung dari pimpinan mampu mempercepat adopsi sistem dan menghindari resistensi di tingkat operasional. Namun demikian, masih terdapat tantangan, terutama pada bagian non-keuangan yang belum menerima intensitas pelatihan yang merata, sebagaimana dikemukakan oleh Informan YA. Meski demikian, kolaborasi aktif antarunit kerja menjadi kompensasi positif dalam menyatukan gerak langkah seluruh tim. Dengan demikian, efektivitas CTAS di LPP RRI Medan dapat dikaitkan secara langsung dengan sinergi antara kepemimpinan transformatif, kesiapan teknologi, kompetensi SDM, serta peran regulasi pusat dalam menciptakan sistem perpajakan yang lebih transparan dan efisien. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan transformasi digital perpajakan bukan semata persoalan teknis, melainkan hasil dari sinergi sistemik antara faktor manusia, kebijakan, dan dukungan teknologi (Khusniah et al., 2025).

### **Transformasi Digital Administrasi Pajak melalui Implementasi Core Tax Administration System (CTAS) dalam Meningkatkan Transparansi dan Efisiensi Layanan Publik di LPP RRI Medan**

Transformasi sistem perpajakan melalui penerapan *Core Tax Administration System* (CTAS) oleh Direktorat Jenderal Pajak merupakan respons strategis terhadap tuntutan reformasi birokrasi dan modernisasi pelayanan publik (Aqilah et al., 2025). Berdasarkan Peraturan Presiden No. 40 Tahun 2018 serta PMK No. 81 Tahun 2024, digitalisasi pajak menjadi instrumen penting dalam meningkatkan transparansi, efisiensi, serta akuntabilitas pelayanan (Erstiawan, 2025). CTAS dirancang sebagai sistem digital yang terintegrasi dan komprehensif, mencakup seluruh proses administrasi perpajakan mulai dari registrasi, pelaporan, pembayaran hingga pengawasan (Khotmi et al., 2025). Di LPP RRI Medan, sistem ini mulai diimplementasikan secara bertahap dengan dukungan dari otoritas pusat serta infrastruktur TI internal yang memadai. Hal ini sejalan dengan tujuan reformasi perpajakan nasional untuk memperkuat institusi perpajakan yang kredibel, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik yang profesional (Jayanti et al.,

2025). Dengan demikian, digitalisasi perpajakan melalui CTAS tidak hanya menjadi alat administratif, tetapi juga strategi peningkatan kepercayaan publik terhadap lembaga.

Penerapan CTAS di LPP RRI Medan menunjukkan efektivitas pendekatan sistematis melalui lima tahapan utama: sosialisasi internal, pelatihan staf, migrasi data, koordinasi lintas unit kerja, serta pendampingan teknis dari KPP. Setiap tahapan dirancang untuk meminimalkan resistensi perubahan serta memastikan adaptasi kelembagaan yang optimal terhadap sistem digital baru. Sosialisasi dilakukan untuk membentuk pemahaman awal, sementara pelatihan teknis menjadi kunci penguasaan operasional sistem oleh staf administrasi. Migrasi data menjadi proses penting untuk menjamin akurasi dan keamanan basis informasi perpajakan, yang selanjutnya mendukung efisiensi audit internal dan eksternal. Kolaborasi lintas bagian, terutama antara unit administrasi, keuangan, dan layanan publik, memperkuat sinergi kelembagaan dalam implementasi sistem. Supervisi teknis dari KPP dan dukungan TI internal menciptakan lingkungan adaptif yang responsif terhadap kendala lapangan, menjadikan CTAS sebagai sistem yang tidak hanya dapat dioperasikan, tetapi juga dapat dioptimalkan.

Dampak signifikan dari implementasi CTAS di LPP RRI Medan terlihat pada peningkatan transparansi pengelolaan pajak. Seluruh aktivitas perpajakan tercatat secara *real-time* dan digital, memungkinkan pelacakan transaksi dengan mudah dan mengurangi potensi penyimpangan administratif. Hal ini menciptakan budaya kerja yang lebih tertib, akuntabel, dan berbasis data. Tidak hanya itu, efisiensi operasional meningkat secara drastis karena proses pelaporan yang sebelumnya manual kini dapat diselesaikan dalam waktu singkat melalui sistem digital. Akses terhadap data perpajakan yang lebih cepat dan akurat juga memungkinkan manajemen untuk melakukan pemantauan serta evaluasi terhadap beban fiskal lembaga dengan lebih objektif. Sistem CTAS, dengan fitur seperti *e-faktur* dan integrasi akun pajak, memberikan fleksibilitas tinggi bagi pengguna dalam pengelolaan pajak, meskipun pada tahap awal masih ditemui kesulitan dalam adaptasi tampilan dan teknis pengisian. Namun demikian, tantangan ini bersifat jangka pendek dan dapat diatasi dengan pelatihan berkelanjutan.

Keberadaan CTAS juga memperkuat prinsip transparansi publik melalui integrasi data dalam satu platform digital yang mendukung proses audit oleh pihak internal maupun eksternal (Lestari & Selfiani, 2025). Data yang terdigitalisasi menjadikan proses verifikasi dan pelaporan lebih cepat dan tepat, sehingga akuntabilitas lembaga terhadap publik meningkat (Rejeki & Syadat, 2025). LPP RRI Medan, sebagai lembaga penyiaran negara, memiliki kewajiban untuk menunjukkan tata kelola keuangan yang profesional (Amanda et al., 2022). Dengan sistem CTAS, pengelolaan kewajiban pajak menjadi lebih tertib dan transparan, mendukung peningkatan kepercayaan masyarakat atas pengelolaan dana publik (Ainun, 2021). Hal ini sejalan dengan teori *stewardship*, yang memandang pegawai sebagai agen organisasi yang bertindak demi kepentingan kolektif, bukan pribadi (Efendi et al., 2022). CTAS menjadi fasilitator teknologis yang memperkuat prinsip *stewardship* melalui pelaporan yang terbuka, sistematis, dan dapat diaudit (Amerieska et al., 2023).

Dari sudut pandang fiskal dan kebijakan pajak nasional, keberadaan CTAS mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak (Arifin et al., 2025). Sistem notifikasi otomatis dan pelaporan terpusat memberikan kemudahan dan pengingat bagi

pengguna untuk memenuhi kewajibannya tepat waktu (Aburizal & Maliki, 2025). Dengan segmentasi data yang lebih akurat, DJP dapat melakukan profiling wajib pajak secara efektif, menganalisis potensi penerimaan pajak, serta mengidentifikasi risiko ketidakpatuhan lebih awal (Dalimunthe & Parinduri, 2025). Hal ini bukan hanya menguntungkan otoritas pajak, tetapi juga lembaga seperti LPP RRI Medan yang dapat merencanakan dan mengelola kewajiban perpajakan dengan lebih efisien. Selain itu, sistem ini memberikan efisiensi biaya operasional melalui penghapusan proses manual, pengurangan kebutuhan pengarsipan fisik, dan minimnya interaksi tatap muka yang seringkali menjadi titik rawan penyimpangan prosedural (Mauni, 2025).

Implementasi *Core Tax Administration System* (CTAS) di LPP RRI Medan menjadi wujud nyata digitalisasi layanan publik yang mendukung reformasi administrasi perpajakan secara menyeluruh. Melalui sistem yang terstruktur, terintegrasi, dan berbasis *real-time*, CTAS berhasil meningkatkan efisiensi administrasi, memperkuat akuntabilitas internal, dan mendorong transparansi lembaga kepada publik (Purnomo et al., 2025). Dengan pendekatan bertahap yang melibatkan dukungan struktural dari pusat dan partisipasi aktif dari seluruh unit kerja, implementasi sistem ini tidak hanya menjadi instrumen administratif, tetapi juga simbol transformasi budaya kerja ke arah yang lebih profesional, efisien, dan terbuka (Utama & Yuliana, 2025). CTAS telah membuktikan dirinya sebagai teknologi strategis yang tidak hanya mempermudah pelaporan pajak, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi negara melalui tata kelola yang akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik yang unggul (Handayani et al., 2025).

### **Analisis Tantangan Implementasi *Core Tax Administration System* (CTAS) di LPP RRI Medan: Perspektif Kelembagaan, Teknologi, dan Sumber Daya Manusia**

Transformasi digital di sektor perpajakan melalui implementasi *Core Tax Administration System* (CTAS) merupakan bagian integral dari agenda reformasi birokrasi fiskal yang dicanangkan Direktorat Jenderal Pajak (Maisyura et al., 2025). Sistem ini didesain untuk menggantikan sistem lama yang terfragmentasi menjadi sebuah sistem terpadu yang mengelola seluruh proses perpajakan, mulai dari pendaftaran, pelaporan, hingga penagihan (Fajriyah, 2025). Namun demikian, implementasi CTAS pada instansi pemerintah seperti LPP RRI Medan menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Salah satunya adalah kesiapan kelembagaan dan sumber daya manusia dalam menerima dan mengadopsi teknologi baru yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mengubah pola kerja dan kultur birokrasi. Tantangan ini menjadi relevan mengingat kesuksesan penerapan sistem digital tidak hanya ditentukan oleh teknologi itu sendiri, melainkan sejauh mana organisasi mampu mengelola perubahan secara strategis dan berkelanjutan.

Secara teknis, salah satu kendala utama yang dihadapi LPP RRI Medan adalah performa sistem CTAS yang belum sepenuhnya stabil. Masalah seperti lambatnya koneksi saat jam sibuk, gangguan akses server, serta frekuensi kesalahan (*error*) saat pengunggahan laporan menimbulkan hambatan dalam proses pelaporan pajak secara tepat waktu (Cahyadi, 2025). Ketergantungan pada konektivitas dan kapasitas server yang belum optimal menjadi bukti bahwa infrastruktur digital yang mendukung sistem ini belum sepenuhnya siap untuk menampung beban operasional lembaga pemerintah berskala besar (Tarihoran et al., 2025). Di samping

itu, antarmuka pengguna CTAS yang dinilai belum cukup intuitif menyulitkan sebagian pegawai, terutama mereka yang tidak memiliki latar belakang teknologi informasi. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan sistem digital tidak hanya menuntut kesiapan teknis, tetapi juga pendekatan desain yang memperhatikan kebutuhan pengguna akhir secara lebih humanistik dan adaptif (Rizal et al., 2024).

Dari sisi sumber daya manusia, terdapat ketimpangan tingkat literasi digital antarkaryawan. Unit-unit kerja seperti redaksi dan teknis terbukti lebih adaptif terhadap CTAS dibandingkan unit administrasi dan keuangan. Hal ini mengindikasikan perlunya pendekatan pelatihan yang lebih tersegmentasi berdasarkan kebutuhan dan kemampuan masing-masing unit kerja. Sebagian besar kesulitan dalam implementasi bukan disebabkan oleh resistensi terhadap perubahan, tetapi lebih kepada keterbatasan pemahaman teknis dan minimnya pendampingan saat proses transisi berlangsung. Pelatihan yang bersifat satu kali dan formal terbukti kurang efektif, sehingga diperlukan skema pelatihan berkelanjutan yang menggabungkan pembelajaran berbasis praktik (*hands-on learning*) dan dukungan teknis secara *real-time*. Strategi ini harus diiringi oleh komitmen manajerial yang kuat untuk mengintegrasikan pengembangan SDM ke dalam agenda perubahan kelembagaan secara menyeluruh.

Selain persoalan teknis dan SDM, rendahnya intensitas sosialisasi dan koordinasi lintas unit menjadi salah satu faktor penghambat keberhasilan implementasi. Sosialisasi CTAS cenderung terpusat pada unit keuangan, sementara unit lain kurang dilibatkan dalam proses pengenalan maupun pelatihan. Ketidakterlibatan ini berakibat pada kurangnya pemahaman kolektif terhadap fungsi, manfaat, dan peran sistem ini dalam mendukung tata kelola organisasi yang lebih efisien dan transparan. Maka, perlu ditekankan bahwa keberhasilan implementasi digitalisasi tidak hanya menuntut kesiapan teknis individual, tetapi juga sinergi antarunit serta budaya organisasi yang terbuka terhadap pembaruan (Alfirdaus & Anas, 2024). Ketiadaan pendekatan manajerial yang menyeluruh dapat menghambat transformasi digital dan menimbulkan segregasi struktural dalam organisasi (Aldo et al., 2025).

Mengacu pada temuan lapangan, solusi terhadap tantangan-tantangan tersebut perlu mencakup tiga dimensi: penguatan infrastruktur digital, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, serta perumusan kebijakan internal yang mendorong integrasi digital secara holistik. Penguatan infrastruktur meliputi peningkatan kapasitas server, manajemen trafik pengguna, serta pengamanan data yang dapat mereduksi resistensi akibat kekhawatiran terhadap privasi. Di sisi lain, peningkatan kapasitas SDM dapat dilakukan melalui kemitraan pelatihan dengan DJP, pengembangan modul pembelajaran internal berbasis kasus (*case-based learning*), serta penggunaan platform e-learning interaktif. Kebijakan internal perlu diarahkan pada percepatan transformasi digital dengan menetapkan standar operasional yang selaras dengan CTAS dan memfasilitasi kolaborasi lintas unit dalam proses implementasinya. Dengan strategi yang terintegrasi, CTAS tidak hanya akan menjadi sistem pelaporan pajak, tetapi juga simbol perubahan dalam tata kelola organisasi menuju pelayanan publik yang transparan, efisien, dan modern (Mauni, 2025).

## **Faktor-Faktor Strategis Penunjang Efektivitas Implementasi *Core Tax Administration System* (CTAS) dalam Mendorong Transparansi dan Efisiensi Layanan Publik di LPP RRI Medan**

Transformasi digital dalam sistem administrasi perpajakan telah menjadi kebutuhan mendesak dalam rangka meningkatkan akuntabilitas, efisiensi, dan transparansi layanan publik (Utama & Yuliana, 2025). Digitalisasi dalam hal ini tidak hanya dimaknai sebagai konversi media manual menjadi elektronik, tetapi juga mencakup perombakan cara kerja, alur informasi, dan pola interaksi antarunit serta antara institusi dengan otoritas fiskal (Rejeki & Syadat, 2025). Dalam hal ini, *Core Tax Administration System* (CTAS) hadir sebagai sistem perpajakan digital terintegrasi yang mendukung otorisasi akses data, pengelolaan *real-time*, serta otomatisasi proses bisnis perpajakan (Handayani et al., 2025). Penerapan sistem ini di LPP RRI Medan menjadi langkah strategis untuk menyesuaikan diri dengan dinamika regulasi dan kemajuan teknologi informasi, serta mendukung sistem self-assessment yang mengedepankan peran aktif wajib pajak dalam pelaporan dan pembayaran kewajibannya.

Keberhasilan implementasi CTAS di LPP RRI Medan tidak terlepas dari sejumlah faktor pendukung internal yang secara nyata memperkuat efektivitas sistem. Salah satu faktor utama adalah komitmen pimpinan organisasi dalam mengarahkan perubahan melalui kepemimpinan transformasional. Gaya kepemimpinan ini mendorong perubahan budaya kerja yang adaptif terhadap teknologi dan memperkuat motivasi karyawan untuk terlibat aktif dalam proses digitalisasi. Kepemimpinan yang visioner juga menciptakan ekosistem kerja yang lebih terbuka terhadap perubahan, serta menurunkan tingkat resistensi terhadap sistem baru. Selain itu, kesiapan infrastruktur teknologi informasi, seperti jaringan internet yang stabil dan perangkat keras yang memadai, berperan sentral dalam memastikan CTAS dapat berfungsi secara optimal dan berkelanjutan.

Faktor lain yang mendukung efektivitas implementasi CTAS di LPP RRI Medan adalah pelatihan dan pendampingan sumber daya manusia (SDM) secara berkala dan terstruktur. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, pelatihan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) serta inisiatif internal organisasi dalam memberikan bimbingan teknis berkelanjutan sangat membantu dalam meningkatkan literasi digital dan pemahaman karyawan terhadap sistem. Tidak hanya sebatas pelatihan teknis, pemahaman tentang fungsi sistem dalam mendukung efisiensi operasional dan kewajiban perpajakan juga menjadi aspek penting yang diperkuat. Hal ini sejalan dengan literatur yang menekankan bahwa literasi pajak yang baik merupakan prasyarat untuk peningkatan kepatuhan dan kepercayaan terhadap otoritas pajak. Hal ini menunjukkan bahwa investasi dalam pengembangan kapasitas SDM merupakan bentuk strategi jangka panjang yang efektif dalam memastikan keberhasilan digitalisasi perpajakan.

Koordinasi antarunit kerja juga menjadi komponen vital dalam mendukung kelancaran adopsi sistem CTAS. Kolaborasi yang terjalin baik antara unit keuangan, redaksi, teknis, dan administrasi memungkinkan adanya sinergi dalam penyamaan prosedur serta percepatan alur informasi. Integrasi proses bisnis yang melibatkan lintas fungsi mendorong efisiensi internal dan mengurangi redundansi data. Dalam hal ini, komunikasi organisasi yang intensif serta kejelasan peran masing-masing unit sangat diperlukan untuk memastikan tidak terjadi tumpang tindih tugas atau resistensi karena ketidakpahaman atas perubahan sistem. Semakin baik sinergi

antarunit, semakin mudah sistem CTAS diterima dan dioperasikan dalam konteks kerja kolektif (Aqilah et al., 2025).

Dukungan regulasi dan kelembagaan dari otoritas pusat, khususnya Direktorat Jenderal Pajak, memberikan legitimasi dan arah yang jelas dalam implementasi CTAS. Dukungan ini diwujudkan melalui penyediaan modul pelatihan, penyusunan SOP yang rinci, serta fasilitasi teknis secara berkala. Dengan adanya kerangka kebijakan yang terstruktur, organisasi lokal seperti LPP RRI Medan memiliki landasan hukum dan operasional yang kokoh untuk menerapkan sistem digital (Gymnastiar et al., 2024). Hal ini menciptakan kepastian regulasi serta meningkatkan kepercayaan pengguna sistem, terutama dalam menghadapi tantangan yang bersifat teknis maupun administratif. Namun demikian, masih ditemukan kesenjangan pelatihan di beberapa unit non-keuangan yang menandakan perlunya pemerataan dukungan dari pusat secara lebih inklusif.

Berdasarkan temuan dan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan implementasi *Core Tax Administration System* (CTAS) di LPP RRI Medan tidak hanya dipengaruhi oleh kecanggihan sistem itu sendiri, tetapi sangat bergantung pada integrasi faktor-faktor pendukung internal dan eksternal. Komitmen pimpinan, kesiapan infrastruktur, kompetensi SDM, koordinasi lintas unit, serta regulasi yang jelas membentuk suatu ekosistem yang kondusif bagi transformasi digital yang berkelanjutan. Hal ini membuat strategi peningkatan efektivitas implementasi CTAS harus mencakup pendekatan multidimensional yang mencakup aspek teknis, struktural, dan kultural. Jika dijalankan secara konsisten dan merata, transformasi digital perpajakan di sektor publik, khususnya melalui CTAS, dapat berkontribusi nyata dalam mewujudkan layanan publik yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel.

## SIMPULAN

Implementasi *Core Tax Administration System* (CTAS) di LPP RRI Medan telah memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan transparansi dan efisiensi layanan publik melalui digitalisasi administrasi perpajakan yang terstruktur dan sistematis. Proses implementasi yang mencakup perencanaan, sosialisasi, pelatihan hingga penerapan teknis sistem membantu mendorong akuntabilitas melalui pencatatan data real time yang dapat ditelusuri. Namun, tantangan tetap muncul, khususnya terkait kesiapan sumber daya manusia yang masih belum merata dalam hal literasi teknologi dan adaptasi terhadap perubahan sistem. Untuk mengatasi hal ini, pelatihan lanjutan dan pendampingan menjadi krusial. Di sisi lain, keberhasilan implementasi turut diperkuat oleh sejumlah faktor pendukung seperti kepemimpinan yang visioner, sinergi antarunit kerja, dan dukungan regulasi dari Direktorat Jenderal Pajak dalam bentuk SOP, pelatihan, serta arahan teknis. Kolaborasi internal dan kejelasan kebijakan turut meningkatkan partisipasi karyawan dan mempercepat integrasi sistem. Pendekatan komprehensif yang menggabungkan aspek teknis, kelembagaan, dan budaya kerja adaptif menjadi kunci dalam memastikan keberhasilan jangka panjang penerapan CTAS sebagai bagian dari transformasi layanan publik berbasis digital.

LPP RRI Medan disarankan agar terus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan berkelanjutan yang difokuskan pada penguasaan teknis sistem CTAS serta pemahaman terhadap regulasi perpajakan digital. Selain itu, penting dilakukan evaluasi rutin dan forum diskusi antarunit kerja guna

menyelaraskan persepsi, meningkatkan komunikasi internal, dan memperkuat koordinasi dalam menjalankan prosedur baru. Untuk meminimalisasi resistensi terhadap perubahan, manajemen perlu mengadopsi pendekatan partisipatif yang melibatkan seluruh pegawai sejak tahap perencanaan. Dukungan regulatif dan teknis dari DJP hendaknya dimanfaatkan secara maksimal agar implementasi CTAS dapat berjalan optimal, berkelanjutan, serta berkontribusi signifikan terhadap peningkatan transparansi dan efisiensi layanan publik di era digital.

## Referensi :

- Amanda, G. T., Ginting, A. D., & Sofiyani, N. (2022). Lembaga Penyiaran Publik-Radio Republik Indonesia: Studi Produksi dan Distribusi Konten Dalam Era Integrasi Media. *Publish: Basic and Applied Research Publication on Communications*, 1(2), 70-91.
- Aburizal, M., & Maliki, A. (2025). Studi Literatur: Analisis Penerapan Aplikasi Coretax Dalam Sistem Perpajakan. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 4(3), 5132-5140.
- Ainun, M. B. (2021). Metafor Kerapan Sapi Dalam Tata Kelola Perusahaan Dari Sudut Pandang Teori Stewardship. *Jurnal Pamator*, 14(2), 95-100.
- Aldo, Noviriani, E., & Roshani. (2025). Exploration Of Netizen Perspectives On The Implementation Of The Core Tax Administration System: (A Netnographic Study). *Jurnal Ilmu Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi Mh Thamrin*, 6(1), 131-150.
- Alfirdaus, N., & Anas, S. (2024). Analisis Efektivitas Coretax Sebagai Strategi Dalam Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah Dki Jakarta. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis*, 4(4), 646-655.
- Amerieska, S., Narsa, I. M., & Ningsih, S. (2023). Manajemen Resiko Berbasis Stewardship Dalam Keberlanjutan Bumdes. *Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 6(2), 173-189.
- Aqilah, S., Wolor, C. W., & Utari, E. D. (2025). Analisis Efisiensi Administrasi Core Tax Administration System (Ctas): Studi Kasus Pada Pt X. *Jurnal Master Manajemen*, 3(2), 205-215.
- Arifin, M. A., Putra, P. S., Oktariansyah, Putra, A. E., Saladin, H., & Emilda. (2025). Edukasi Penggunaan Coretax Administration System Pada Mahasiswa Akuntansi Bidang Perpajakan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 163-170.
- Arikunto, S. (2019). *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Asmoro, P. V. P., Hanifah, U., & Sari, V. R. (2024). Digital Tax Revolution: Sin Dan Coretax Sebagai Game-Changer Dalam Integrasi Perpajakan Nasional. *Seminar Nasional & Call For Paper*, 1(1), 583-589.
- Cahyadi, R. U. (2025). Sosialisasi Core Tax Administration System Dalam Meningkatkan Self- Assessment System Pada Gen-Z Di Bekasi. *Jurnal Pengabdian Nusantara*, 9(2), 593-600.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative Inquiry And Research Design Choosing Among Five Approaches (4th Edition Ed.)*. California: Sage Publishing.
- Dalimunthe, M. I., & Parinduri, R. Y. (2025). Sinergi Kebijakan Pajak Dan Reformasi Birokrasi Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak: Studi Evaluatif Pada Administrasi Perpajakan Di Indonesia. *Jurnal Afosj-Las*, 5(2), 163-175.

- Efendi, R., Muawanah, U., & Adi, K. (2022). Stewardship Theory Di Antara Hubungan Corporate Risk, Kompensasi Eksekutif, Karakteristik Eksekutif, Dan Kepemilikan Saham Pemerintah Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ekonomi Modernisasi*, 18(1), 86-100.
- Erstiawan, M. S. (2025). Modernisasi Perpajakan Indonesia Dengan Aplikasi Coretax Perspektif Content Analysis. *Jurnal Majalah Ekonomi*, 31(1), 1-17.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif. *Humanika*, 21(1), 33-54.
- Fajriyah, N. N. (2025). Pengaruh Core Tax Administrations System (Ctas) Terhadap Reformasi Sistem Perpajakan Pada Era Digital. *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, 3(1), 136-150.
- Faruq, U., Adipurno, S., Aziz, A., Faadhilah, N., & Ridwan, M. (2024). Konsep Dasar Pajak Dan Lembaga Yang Dikenakan Pajak: Tinjauan Literatur Dan Implikasi Untuk Kebijakan Fiskal. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 16(2), 65-70.
- Gymnastiar, F. R., Nugroho, E., & Fatimah, A. N. (2024). Konvergensi Produksi Media Pada Proses Produksi Radio Multiplatform (Studi Etnografi Berbasis Teori Determinisme Teknologi Pada Radio Republik Indonesia). *Jurnal Ranah Research*, 6(5), 1476-1485.
- Handayani, Y. R., Biswas, N. P., Akbar, H., & Isnaini, Z. (2025). Peran Relawan Pajak Dalam Pelaporan Spt Dan Aktivasi Coretax 2025 Bagi Wajib Pajak. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara*, 6(2), 2525-2534.
- Hasanah, U. (2024). Literature Review : Strategi Sistem Single Identity Number (Sin) Dalam Optimalisasi Penerimaan Pajak. *Riset & Jurnal Akuntansi*, 8(2), 1028-1040.
- Indonesia, K. K. R. (2024). Realisasi Belanja Satker Per Jenis Belanja. In *Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia*.
- Jayanti, R. D., Purba, A. S., Rezkianti, N. A., & Azalia, A. N. F. (2025). Peningkatan Efisiensi Ekonomi Melalui Edukasi Pajak Dan Akuntansi Untuk Umkm. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bidang Akuntansi, Manajemen, Dan Ekonomi*, 2(2), 48-53.
- Khotmi, H., Suparlan, & Setiawati, E. (2025). Optimalisasi Kepatuhan Pelaporan Ppn Melalui Coretax Dan Efisiensi Pajak. *Jurnal Aplikasi Perpajakan*, 6(1), 1-18.
- Khusniah, W., Merbaka, Z. R., Pahala, I., & Wahono, P. (2025). The Role Of Digital Coretax Technology In Enhancing Corporate Income Tax Compliance. *The Future Of Education Journal*, 4(6), 1514-1521.
- Korat, C., & Munandar, A. (2025). Penerapan Core Tax Administration System (Ctas) Langkah Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan Di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi Politala*, 8(1), 17-30.
- Lestari, R. A., & Selfiani. (2025). Pengaruh Implementasi Sistem Coretax Dan Akuntabilitas Terhadap Transparansi Perpajakan Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Pajak Dan Informasi (Jakpi)*, 5(1), 155-165.
- Maisyura, D., Syafina, L., & Nurwani. (2025). Analysis Of The Core Tax Digitalization Innovation System For The World Of Taxation For The Compliance Of Taxpayers Of North Sumatra Province. *Ampop Management Accounting Review Journal*, 5(2), 214-228. <https://doi.org/10.37531/amar.v5i2.2775>
- Mauni, C. (2025). Peran Teknologi Informasi Dalam Meningkatkan Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 3(1), 104-115.
- Moleong. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pt. Remaja Rosdakarya.

- Nabila, D. T. Della, Jumaidi, L. T., Lestari, B. A. H., Firmansyah, M., Hadi, Y. F., & Sandya, S. (2024). Penyederhanaan Proses Perpajakan Melalui Penggunaan Core Tax Administration System Sebagai Sistem Pajak Terbaru. *Jurnal Abdimas*, 6(2), 89-93.
- Nurhaeni, D. F., Masitoh, D., Shofurani, H., Livtanta, N. K., & Ridwan. (2025). Analisis Efektifitas Dan Efisiensi Sistem Coretax: Mengukur Kepercayaan Publik Di Tengah Transisi Sistem Perpajakan 2025. *Jurnal Sosial Politika*, 6(1), 20-36.
- Purnomo, T., Sadiqin, A., & Arvita, R. (2025). Analisis Implementasi Aplikasi Pajak Coretax Dalam Meningkatkan Kepatuhan Dan Efisiensi Pelaporan Pajak Di Indonesia. *Journal Of Economics, Business, Management, Accounting And Social Sciences*, 3(2), 114-118.
- Rejeki, T. S., & Syadat, F. A. (2025). Analisis Implementasi Kebijakan Pemindahbukuan Dana Pajak Secara Elektronik Dalam Upaya Meningkatkan Digitalisasi Layanan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Utara. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 197-204.
- Rizal, M., Permana, N., & Qalbia, F. (2024). Transformasi Sistem Perpajakan Di Era Digital: Tantangan, Inovasi, Dan Kebijakan Adaptif. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 4(4), 340-348.
- Tarihoran, Y. N., Warongan, J., & Pangerapan, S. (2025). Analysis Of Tax Authority Readiness In Implementing The Core Tax Administration System (Ctas) In Indonesia (A Study At The Manado Pratama Tax Service Office). *East Asian Journal Of Multidisciplinary Research*, 4(4), 1437-1452.
- Utama, K. C., & Yuliana, L. (2025). Implementasi Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Coretax) Terhadap Efisiensi Kinerja Pegawai Di Direktorat Jenderal Pajak. *Jurnal Master Manajemen*, 3(2), 43-56.
- Wahidah, W., Mulya, F. R., Asniwaty, A., & Indriaty, L. I. L. (2025). Transparansi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pada Radio Republik Indonesia (RRI) Merauke. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 17(1), 199-208.